



Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri (*Zelfbestuur*) 1916 Sarekat Islam: Sebuah Rekonstruksi Sejarah Masa Depan

Nunu A Hamijaya¹

¹ Gala Pustaka Nusantara (Gapura) Project Pusat Studi Sunda, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 09-01-2026

Revised 14-02-2026

Accepted 06-03-2026

Published 14-04-2026

Keywords:

The Desire for Self-Governance, Sarekat Islam, Bandung, Tjokroaminoto, *Zelfbestuur*

Correspondence:

nunuahamijaya68@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study is to analyze the history of the Zero Point of the Will for Self-Governance (*Zelfbestuur*) 1916 Sarekat Islam: A Reconstruction of Future History. This study employs a qualitative approach through literature review and reflective analysis. The methodological steps employed include Normative Analysis, Historical Analysis, and Reflective Analysis. The primary source, the book Zero Point of the Will for Self-Governance (*Zelfbestuur*) 1916, serves as the conceptual foundation and main reference. Based on the findings, 'the will for self-governance (*zelfbestuur*)' is a mantra. In the socio-political context of 100 (one hundred) years ago, this was a historic event for indigenous Muslims in the East Indies, after the power and sovereignty of many sultanates across the Nusantara region gradually weakened and eventually succumbed to Western colonial rule, with the last being the Sultanate of Aceh (1902). The struggle to achieve the ideal of self-governance for the indigenous Muslim people, pioneered by the Central Sarekat Islam, was in fact a metamorphosis and transformation of the substance of the sultanate or caliphate (Ottoman Turkey) governance model—one that was more egalitarian and non-feudal, relying on genealogy for succession. We must seek a new starting point agreed upon by the indigenous Muslim people of Indonesia today, so that the history of *Zelfbestuur* from 100 years ago becomes not only a collective memory but also the driving force behind a shared movement to realize it in this millennium. From the perspective of historical scholarship, the NATICO I event certainly deserves attention through various national history seminars, enriched with documents and data. Indeed, from a political science perspective, the history of governance will also undergo reconstruction.*

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejarah Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri (*Zelfbestuur*) 1916 Sarekat Islam: Sebuah Rekonstruksi Sejarah Masa Depan. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis reflektif. Beberapa langkah metode yang digunakan adalah Kajian Normatif, Kajian Historis, Analisis Reflektif dan Sumber Utama buku Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri (*Zelfbestuur*) 1916 digunakan sebagai basis konseptual dan rujukan utama. Berdasarkan hasil pembahasan, 'Kehendak berpemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*)' adalah sebuah mantra. Dalam konteks sosial politik 100 (seratus tahun) yang lalu adalah peristiwa bersejarah bagi pribumi muslim di Hindia Timur, setelah kekuatan dan kedaulatan banyak kesultanan di wilayah



Nusantara satu persatu melemah dan akhirnya tunduk di bawah kuasa Kolonialisme Bangsa Barat, yang terakhir adalah Kesultanan Aceh (1902). Model perjuangan meraih cita untuk berpemerintahan sendiri bagi bangsa pribumi muslim yang dipelopori Central Sarekat Islam sesungguhnya sebuah metamorfosis dan transformasi dari substansi berpemerintahan model kesultanan-kesultanan atau kekhilafahan (Turki Usmaniyyah) yang lebih egaliter dan non-feodalisme, yang mengandalkan geneologis dalam suksesinya. Kita harus mencari Titik Nol baru yang disepakai oleh pribumi bangsa muslim di Indonesia saat ini, sehingga sejarah masa depan *Zelbestuur*, 100 tahun yang lalu bukan saja menjadi ingatan kolektif tetapi juga menjadi semangat gerakan bersama untuk mewujudkannya di Melinium ini. Dari sudut kajian ilmiah sejarah, tentulah peristiwa NATICO I perlu mendapatkan perhatian dengan berbagai seminar nasional sejarah, yang lebih kaya dengan dokumen dan data-data. Bahkan, dengan perspektif ilmu pemerintahan, sejarah pemerintahan pun akan mengalami rekonstruksi.

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini ditulis sebagai bentuk kesadaran sejarah dan ingatan kolektif terhadap beberapa ikon sejarah nasional yang dipinggirkan atau dilupakan oleh satu dan lain alasan. Idiom terkenal menyatakan, 'sejarah adalah milik para penguasa dan pemenang' sebuah realitas yang dirasakan hingga kini. Oleh karena itu, kejujuran sejarah harus ditunjang oleh suatu ingatan kolektif yang tetap hidup dalam pergerakan para pelaku sejarah yang diwariskan kepada anak-cucu hingga kini.

Peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Nasional (2017) adalah momentum yang sangat penting untuk mengkaji ulang sejarah nasional kita dan penelitian ini menawarkan diri untuk kembali ke Titik Nol kehendak berpemerintahan dari bangsa pribumi muslim di Hindia Timur.

Pada dasarnya, penelitian ini memberikan penjelasan, fakta, keyakinan, asumsi dan ingatan kolektif penulis tentang peristiwa National Congres Centraal Sjarikat Islam (NATICO CSI) I 1916 di Kota Bandung dalam perspetif terbaru, yang kiranya memberikan manfaat untuk menatap masa depan dan meraih kejayaan Islam sesungguhnya.

Bagaimana peristiwa NATICO I tahun 1916 memiliki makna sangat penting bagi perjalanan sejarah nasional Indonesia, bahkan merupakan Titik Nol kesadaran pribumi Hindia Timur yang berkehendak untuk merdeka dan berpemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*) berlandaskan ikatan cita-cita Islam ?

Bagaimanakah setting sosial politik dan ekonomi sebelum dan sesudah peristiwa tersebut memberi dampak terhadap kebijakan politik Hindia Belanda dan sikap aktivitas pergerakan politik kebangsaan ?

Peristiwa NATICO I CSI, sejauh yang tim ketahui tidak atau belum ada sebuah skripsi, tesis atau disertasi yang membahas dan mengangkatnya sebagai tema besar, sebagai Titik Nol atau setidaknya-tidaknya bagian dari ingatan kolektif bangsa pribumi muslim (Indonesia) bukan sekedar sebagai agenda CSI semata-mata. Kata 'natie' pertama kali digunakan oleh pribumi muslim untuk menyebut komunitas trans sukubangsa berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Madura, Bali dan Nusatenggara, yang kala itu disebut sebagai wilayah Sunda Besar dan Sunda Kecil (saat ini dihapuskan dalam dunia peta geografis wilayah NKRI). Meskipun mereka berasal dari berbagai suku/etnis, sebagai 'natie' sebagai pribumi mereka diikat oleh simpul kesamaan ideologi yaitu Islam sebagai ideologi pembebasan.

Oleh karena itu, ide tentang 'natie' bukanlah pinjaman dari buah pikiran Ernest Renan, yang kemudian bermetamorfosis menjadi 'nasionalisme'. Namun, yang terjadi adalah memang ada semacam perbedaan asas ideologi, yang dibangun melalui term 'nasionalisme' ini, yaitu kebangsaan yang berlandaskan Islam, kebangsaan yang berlandaskan sosialisme-kapitalisme, dan kebangsaan yang berlandaskan kejawen atau theosofi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Titik Nol.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis reflektif. Beberapa langkah metode yang digunakan adalah:

1. Kajian Normatif: merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan, syura, dan bernegara.
2. Kajian Historis: menelusuri jejak pendidikan politik umat dalam sejarah Islam global dan Indonesia.
3. Analisis Reflektif: mengaitkan nilai-nilai normatif dan historis tersebut dengan kondisi kontemporer bangsa Indonesia, serta menawarkan strategi menuju 2045.
4. Sumber Utama: buku Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri karya Nunu A. Hamijaya digunakan sebagai basis konseptual dan rujukan utama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laweyan : Titik Nol Kemerdekaan Wilayah

Laweyan, sebuah wilayah di daerah Surakarta (Sekarang Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta) dikenal sebagai pusat perdagangan yang berjaya sejak Kesultanan Pajang berkuasa. Memiliki status wilayah sebagai tanah perdikan yang berarti memiliki kedaulatan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan perekonomiannya sendiri (An Nuur Sakha, 2011). Memiliki kekuatan ekonomi yang dipegang oleh para saudagar yang sejajar dengan rakyat jelara dalam pandangan masyarakat feodal Jawa. Hingga abad ke-19, Laweyan telah bermetamorfosis dari perdagangan tenun tradisional dan kapas berubah menjadi kampung pembuat mori, hingga menjadi pusat batik cap. Perubahan Laweyan menjadi pusat industri batik disebabkan oleh penghargaan yang tinggi terhadap seni membatik (Suryanegara, 1998).

Kawasan Laweyan merupakan kawasan yang unik karena mempunyai pola kawasan memusat, dengan Pasar sebagai pusat kawasan, sedang pemukiman penduduk dengan *home industry* tenunnya merupakan kawasan pelingkup. Laweyan berkembang pesat antara tahun 1910-1930, hingga 85% produksi batik di Surakarta berada di tangan saudagar batik Laweyan, karena sekitar 90% penduduk Laweyan menjadi pengusaha Batik. (Soedarmono, 2006:66). Dengan adanya hasil tersebut, Laweyan menjadi salah satu pusat terpenting kerajinan Batik Nasional pada masa Hindia Belanda karena menjadi pesaing kerajinan tekstil Eropa.

Dalam Keberhasilan Laweyan, perempuan memiliki peranan penting, khususnya dalam pembuatan batik tulis dan pengolahannya karena pekerjaan ini memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Terlebih karena adanya jenis batik tertentu yang tetap dilukis dengan tangan, sehingga hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, Perempuan laweyan akhirnya memiliki kedudukan khusus dalam strata sosial Laweyan. Ditunjukkan dengan adanya gelar "Mbok Mase" yang sejajar dengan gelar abdi dalem kriya pembatik dalam Istana. Hingga awal abad ke-20 an, dinamika perkembangan kegiatan perdagangan dikendalikan oleh "Mbok Mase". Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi Laweyan cukup menonjol (Priyatmono, 2004).

Kekuatan ekonomi Laweyan inilah yang menjadikan Laweyan sebagai wilayah yang merdeka secara ekonomi. Kemerdekaan ekonomi tentu berdampak pada pendirian wilayah otonomi atau memiliki pemerintah sendiri (Fajar Shodiq, 2017).

Diawali dengan status wilayah perdikan yang bebas pajak wilayah hingga menjadi wilayah yang dianggap menjadi saingan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perekonomian, Laweyan menjadi wilayah yang memiliki kemerdekaan ekonomi (Fauziah Kurniati, 2015).

2. Sarekat Dagang Islam : Titik Nol Perkumpulan Ekonomi di Laweyan

Pada akhir abad ke-19, perekonomian bumiputera dalam kondisi memburuk. Kondisi tersebut disebabkan adanya krisis global yang berlangsung terus menerus. Namun, di sisi lain, orang Cina terus menerus mengonsolidasikan posisi ekonomi dan mendapat keuntungan ekonomi yang besar. Awal abad ke 20, pedagang Cina dan Arab mengalami peningkatan pesat baik pada bidang produksi, industri dan pengangkutan. Hal ini pun karena Pemerintah memberikan perlindungan kepada para pedagang asing tersebut, sehingga membuat mereka dapat bergerak dengan leluasa dalam bidang perekonomian. Namun, sebaliknya para pedagang lokal mengalami penurunan karena adanya monopoli perdagangan antara pemerintah dan pengusaha asing.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat bumiputera banyak mengalami ketertindasan, kebangkrutan dan susah untuk bersaing dalam perdagangan. Atas dasar kondisi tersebut, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan membentuk Organisasi Sarekat Dagang Islam (Selanjutnya : SDI) tanggal 16 Sya'ban 1323, Senin Legi, 16 Oktober 1905 di Surakarta (Suharto, 2021).

Maksud utama pembentukan organisasi tersebut ialah untuk memperkuat usaha dalam menghadapi para pedagang Cina, namun selain tujuan ini, SDI adalah guna menghadapi persaingan dagang dengan orang Cina dan sikap superioritas mereka terhadap Bumiputera sehubungan dengan berhasilnya Revolusi Cina, untuk mengatasi tekanan dari kalangan bangsawan (Mangkunegara) yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu, untuk membuat front perdagangan menghadapi semua penghinaan terhadap bumiputera, serta sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumiputera dan Eropa.

Dengan berdirinya SDI, H. Samanhudi mampu menembus permainan pemerintah Belanda. Beliau berhubungan langsung dengan para importir Eropa, dan tidak melalui orang Cina, dengan tidak membeli bahan bakubatik dari orang-orang Cina. Disisi lain, SDI juga membangun kerja sama dengan pengusaha Cina yang dikenal dengan Kong Sing tahun 1911 M. Kerjasama dengan pengusaha Cina, menjadikan pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa SDI merupakan bahaya besar bagi eksistensi dan perkembangan imperialis Belanda.

Kebangkitan SDI merupakan awal keberhasilan gerakan pembaruan, sistem organisasi di bumiputera, tidak hanya organisasi Islam. Hal ini karena suatu pembaruan atau suatu reformasi memerlukan ketangguhan organisasi dan kontinuitas perolehan dana. Tindakan H. Samanhudi dengan SDInya tentu sangat strategis. Upaya kebangkitannya menjadikan pasar sebagai lahan operasi, dan memperoleh dana sehingga mampu menjaga keberlangsungan organisasinya.

Kiprah perjuangan SDI dalam membangun ekonomi umat, tidak terlepas dari Islam, yang dijadikan sumber inspirasi, sumber pergerakan, serta sumber ideology yang mampu menjadi motor penggerak persaingan ekonomi, sebagaimana diungkapkan Abu Hanifah (1978) berikut :

“Jadi resmi dalam bulan September 1906, H. Samanhudi memimpin gerakan rakyat yang dinamakan Sarekat Dagang Islam, yang dalam tempo singkat tidak saja bergerak di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kebetulan memang di sinilah berada pedagang-pedagang pribumi beragama Islam yang berpengaruh dan cukup kuat, untuk menentang hegemoni pedagang Cina. Lama-kelamaan persaingan dengan pedagang Cina menjadi seru dan terbuka. Sarekat Dagang Islam kesudahannya merupakan suatu gerakan nasional dan militan, sekalipun beragama Islam.”

Menjadikan Islam sebagai ideologi, Sarekat Dagang Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. SDI mampu mengangkat apa yang menjadi kegelisahan masyarakat atas berbagai kebijakan Kolonial Hindia Belanda yang merugikan mereka dan menganggap SDI sebagai alat bela diri terhadap kekuasaan kolonial.

Di bawah kondisi kebangkitan Ulama melalui aktivitas, pemerintah kolonial Belanda berupaya mendirikan organisasi tandingan. Seperti halnya dalam menandingi Djamiat Choir, 13 Jumadil Awwal 1323, Senin Kliwon 1905 M, atas saran Bupati Serang, P. A.A Djajadiningrat, dibangunlah organisasi Budi Oetomo, 20 Mei 1908, yang dalam bahasa Jawa memiliki Kesamaan Arti dengan Djamiat Choir. Demikian pula untuk menandingi Sarekat Dagang Islam, pemerintah kolonial mendirikan organisasi yang hampir sama, yaitu Sarekat Dagang Islamiyah, 1909 M, di Bogor (Suryanegara, 2011b).

3. Sarekat Islam : Titik Nol Pergerakan Politik Bangsa

Semenjak berdirinya Sarekat Dagang Islam (1905) di Surakarta, Sarekat Dagang Islam muncul diberbagai wilayah. Kemajuan pesat organisasi terbukti dengan adanya perubahan visi dan misi organisasi yang diawali dengan visi dan misi kemerdekaan secara ekonomi, kemudian berkembang menjadi visi dan misi secara

global (menyeluruh) meliputi seluruh aspek kehidupan. Gagasan politik inilah yang akhirnya mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan ini ditandai dengan diberikannya status pengesahan dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai Organisasi berbadan hukum (*rechtspersoon*) (Suryanegara, 2011a).

Kemunculan gagasan dan perkembangan tersebut, didasarkan oleh faktor ideologis yaitu Islam. Islam-lah yang disebut-sebut menjadi pengikat dan pemersatu. Islam-lah menjadi semacam semen pengikat puluhan juta orang Indonesia dan bergabung bersama Sarikat Islam. Alasan lain adalah munculnya harapan-harapan zaman keemasan yang serta menganggap pemimpin-pemimpin sebagai juru selamat atau ratu adil akhirnya memikat banyak orang untuk masuk (Korver, 1985: 66).

Perubahan gagasan tersebut disebabkan atas usulan R. Oemar Said Coktoaminoto, yang pada saat itu menjadi pimpinan SDI Surabaya. Tjokroaminoto memiliki pandangan jauh ke depan, terutama bila dikaitkan dengan aspek sosial politik (Setyarso, 2017). Sebab kalau SDI yang dikembangkan maka umat Islam yang bukan dari kalangan pedagang tidak akan tertampung dan tidak bisa menyalurkan aspirasi sosialnya. Penetapan perubahan SDI menjadi SI, pada tanggal 10 September 1912 setelah Tjokroaminoto menghadap Notaris B. ter Kuile di Solo untuk membuat Sarikat Islam sebagai badan Hukum berdasarkan Anggaran Dasar SI yang diakui dan disetujui oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912.

Satu tahun kemudian, Sarikat Islam mengadakan dalam kongres besar pertama pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya, yang dihadiri oleh 8.000-10.000 delegasi, baik dari maupun dari luar Surabaya. Sarikat Islam tumbuh dengan pesat sehingga memunculkan Sarikat Islam Surabaya, Sarikat Islam Semarang, Sarikat Islam Cianjur, Sarikat Islam Sumatera dan hampir seluruh wilayah terdapat cabang Sarikat Islam. Perubahan ini, tentunya menjadi momen dimana seluruh muslim di seluruh Hindia Belanda turut serta dalam kegiatan Sarikat Islam (Gani, M.A, 1984: 6-12).

4. NATICO I : Titik Nol Kebangkitan Bangsa

Tahun 1916 CSI (Central Sarekat Islam) (Central Sarikat Islam digunakan sejak 18 Maret 1916, berdasarkan pengakuan hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Sarekat Islam didirikan pada tanggal 10 September 1912 di Surakarta) berhasil melakukan sebuah pertemuan politik pertama secara nasional para pribumi muslim se-Hindia Timur (Nusantara) bertempat di Bandung. NATICO I diikuti oleh 80 cabang SI, yang berasal dari Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi.

Peserta NATICO I, yang hadir pada saat pidato pertama Tjokroaminoto di alun-alun Bandung sebanyak 860,000. Jumlah massa muslim sebanyak itu merupakan suatu fenomenal untuk jumlah massa pada masa itu. Sebagai perbandingan pada Kongres I Sarekat Islam (1913) di Surabaya yang dihadiri pada saat pembukaanya sebanyak 5,000- 8,000 (Hamijaya, 2019).

Kegiatan kongres terdiri dari 3 macam rapat : (1) Rapat pendahuluan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 1916 dan rapat-rapat tertutup. Rapat-rapat ini hanya dihadiri oleh anggota dari Pimpinan Pusat, (2) Dua rapat terbuka di alun-alun, pada hari Minggu tanggal 18 Juni dan Senin, 19 Juni 1916, dimana tiap-tiap orang dapat datang dan mendengarkan pidato-pidato yang diadakan. (3) Enam rapat di salah satu bangsal dari Societiet Concordia yang hanya dapat dihadiri oleh para utusan dan anggota Sarikat Islam Lokal, serta undangan, dan utusan dari pergerakan sahabat dan pers.

Yang paling penting dalam kongres bagi sejarah perkembangan politik di Indonesia, ialah pidato Tjokroaminoto yang diucapkan pada rapat umum di alun-alun pada Hari Ahad , 18 Juni 1916. Dalam pidato yang fenomenal tersebut, Tjokroaminoto menyampaikan secara tegas gagasan kehendak berpemerintahan sendiri.

5. Penggal Pidato Tjokroaminoto

Pidato di bawah ini sebenarnya berbahasa melayu. Namun, dijadikan arsip oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk dilaporkan ke pemerintah Nederland ke bahasa Belanda. Pidato tersebut dipublikasi melalui dokumen yang berjudul *De Volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indie*, disusun oleh Dr. S.L. van der Wal terbitan J.B. Wolters, Groningen, tahun 1964.

Berikut penggalan pidato Tjokroaminoto yang diterjemahkan oleh Mohammad Roem:

“Kita cinta bangsa sendiri dan dengan kekuatan ajaran agama kita, agama Islam, kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita, atau sebagian besar dari bangsa kita; Kita cinta tanah air, dimana kita dilahirkan; dan kita cinta pemerintah yang melindungi kita. Karena itu, kita tidak takut untuk minta perhatian atas segala sesuatu, yang kita anggap baik, dan menuntut apa saja, yang dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintah kita. Untuk mencapai tujuan kita, dan untuk memudahkan cara kerja kita agar rencana raksasa itu dapat dilaksanakan maka perlulah dan kita harap dengan sangat agar diadakan peraturan yang memberi kita penduduk bumiputera hak untuk ikut serta dalam mengadakan bermacam-macam peraturan yang sekarang sedang kita pikirkan. Tidak boleh terjadi lagi, bahwa dibuat perundang-undangan untuk kita bahwa kita diperintah tanpa kita, dan tanpa ikut serta dari kita.

Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan dan keinginan yang besar, kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya ratu adil, atau kejadian yang bukan-bukan, yang kenyataannya memang tidak akan terjadi. Tapi kita terus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur akan datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda, paling sedikit Dewan Jajahan, agar kita dapat ikut berbicara dalam urusan pemerintahan. Tuan-tuan jangan takut bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan 'Pemerintahan Sendiri'. Dengan sendirinya kita tidak takut untuk memakai perkataan itu, karena ada undang-undang (wet) yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk yang juga mempergunakan perkataan 'pemerintahan sendiri' yaitu Undang-undang 23 Juli 1903 tentang Desentralisasi dari Pemerintah Hindia Belanda, yang memuat keputusan Sri Ratu Wilhelmina di mana Sri Ratu memandang perlu agar untuk keresidenan atau bagian-bagian daerah membuka kemungkinan untuk mencapai pemerintahan sendiri.

Berhubung dengan sabda ratu di atas yang menyebabkan kita berani berbicara tentang pemerintahan sendiri, dan karena itu juga kita dapat memikirkan lebih lanjut bagaimana keinginan Ratu itu dapat selekas mungkin dan dengan sempurna dilaksanakan. Dalam permulaan Sri Ratu hanya mengharapkan tercapainya pemerintahan sendiri dari daerah-daerah atau sebagian dari daerah, akan tetapi kita yakin, bahwa dalam harapan Sri Ratu itu tersimpul maksud agar pada saatnya juga untuk seluruh Hindia Belanda mencapai status pemerintahan sendiri.

Tidak dapat diragu-ragukan bahwa ratu kita adalah bijaksana. Semakin lama semakin bertambah kesadaran orang, baik pun di Nederland maupun di Hindia bahwa pemerintahan sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan bahwa tidak patut lagi Hindia diperintah oleh Netherland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya. Tidak patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasan, yang hanya mendapat makan karena susunya. Tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung, dan sekarang juga sudah tidak patut lagi, bahwa penduduknya, terutama putera-buminya, tidak punya hak untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan yang mengatur nasibnya.

Segala puji kepada Allah Tuhan Maha Adil. Tuhan mendengar keinginan hamba-Nya. Ratu kita dan pemerintah bijaksana. Perubahan besar pasal 111 RR., yang melarang mengadakan rapat-rapat politik sudah dicabut, dan meskipun belum sama sekali dikubur, tapi tidak dijalankan lagi. Meskipun mengadakan kongres jatuh di bawa pasa 111 tersebut, kita berbesar hati bahwa pemerintah dan pemerintah daerah di Bandung memberi izin mengadakan rapat-rapat ini Kita menyadari dan mengerti benar bahwa mengadakan pemerintahan sendiri adalah suatu hal yang sangat sulit, dan bagi kita hal itu laksana suatu impian. Akan tetapi bukan impian dalam waktu tidur, tapi harapan yang tertentu yang dapat dilaksanakan jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita dan dengan memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan menurut hukum.

Kita sama sekali tidak berteriak, "Persetan Pemerintah". Kita malah berseru, "Dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah dan untuk membantu pemerintah menuju ke arah yang benar". Tujuan kita ialah bersatunya Hindia

dan Netherland untuk menjadi warga-negara “Negara Hindia”, yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Semakin lama, semakin tambah kesadaran orang, baikpun di Nederland maupun di Hindia, bahwa “**Pemerintahan sendiri**” adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan, bahwa tidak patut lagi Hindia diperintah oleh Nederland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya. Tidak patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasan, yang hanya mendapat makan karena susunya; tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung, dan sekarang juga sudah tidak patut lagi, bahwa penduduknya, terutama putera-buminya, tidak punya hak untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan, yang mengatur nasibnya.

Kita menyadari dan mengerti benar, bahwa mengadakan pemerintahan sendiri, adalah satu hal yang sangat sulit, dan bagi kita hal itu laksana suatu mimpi. Akan tetapi bukan impian dalam waktu tidur, tapi harapan yang tertentu, yang dapat dilaksanakan jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita, dan dengan memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan menurut hukum.

Di bawah Pemerintahan yang tiranik dan dholim, hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan REVOLUSI, sedang dari suatu pemerintahan yang bijaksana dengan EVOLUSI (Hamijaya, 2019).

Pada bagian penutup Tjokroaminoto berkata:

Kongres yang terhormat, bangsaku dan kawan-kawan separtai yang saya cintai. Maka perlu sekali kita bekerja keras. Meskipun pemerintah yang maju mampu dan tentu bersedia mendidik anak buahnya dan membangkitkan energi anak buahnya, agar mereka semakin maju dalam kehidupannya, hak-hak dan kebebasan politik baru diberikan kepada satu rakyat kalau rakyat itu meminta sendiri dengan memaksa; jarang sekali terjadi bahwa hak dan kebebasan semacam itu diberikan sebagai hadiah oleh suatu pemerintah. Di bawah pemerintah yang tiranik dan dholim hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi. Sedang dari suatu pemerintah yang bijaksana dengan evolusi, gerakan yang patut. Kita berharap bahwa gerakan evolusi ini senantiasa akan berlangsung di bawah Sang Tiga Warna. Tapi bagaimanapun juga rakyat harus bekerja untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dengan pidato tersebut, Tjokroaminoto khususnya, Central Sarikat Islam pada umumnya mengajak masyarakat untuk memiliki pemerintahan sendiri, dengan segala upaya dan berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita.

6. NATICO : Titik Nol yang Terlupakan?

Sejujurnya kami mengalami kesulitan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan dan dokumen-dokumen otentik tentang peristiwa bersejarah ini. Kemungkinan besar bahwa *icon* NATICO CSI, yang mula pertama menggunakan Gedung Concordia itu seolah-olah dihapuskan, atau mungkin dihilangkan dari ingatan

kolektif kesadaran sejarah bangsa pribumi muslim ini. Kita tidak akan menemukan sama sekali sejarah CSI dengan NATICO I-nya di Gedung Merdeka saat ini.

Generasi muda Bandung saja jika melihat Gedung Merdeka, maka yang ada dalam pikirannya adalah tentang Konferensi Asia Afrika (1955) (Indonesia, 2017). Dan kalau mereka saat ini, bermain bersuka cita di lapangan Alun-alun Kota Bandung di depannya ada masjid, maka yang dikenangnya adalah lantai karpet sintetis berwarna hijau seperti rumput karya Walikota Ridwan Kamil. Padahal, disana dengan panggung sederhana pernah terjadi peristiwa monumental, sebuah pidato fenomenal awal Abad ke-20 di sebuah negeri Kolonial Hindia Belanda, seorang pribumi muslim keturunan ningrat dan ulama, yang diberi gelar ‘Sang Raja Tanpa Mahkota’, bernama Oemar Said Tjokroaminoto lantang berbicara tentang kewajiban untuk merdeka dan berpemerintahan sendiri.

D. SIMPULAN

‘Kehendak berpemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*)’ adalah sebuah mantra. Dalam konteks sosial politik 100 (seratus tahun) yang lalu adalah peristiwa bersejarah bagi pribumi muslim di Hindia Timur, setelah kekuatan dan kedaulatan banyak kesultanan di wilayah Nusantara satu persatu melemah dan akhirnya tunduk di bawah kuasa Kolonialisme Bangsa Barat, yang terakhir adalah Kesultanan Aceh (1902). Model perjuangan meraih cita untuk berpemerintahan sendiri bagi bangsa pribumi muslim yang dipelopori Central Sarekat Islam sesungguhnya sebuah metamorfosis dan transformasi dari substansi berpemerintahan model kesultanan-kesultanan atau kekhalifahan (Turki Usmaniyyah) yang lebih egaliter dan non-feodalisme, yang mengandalkan geneologis dalam suksesinya.

Kendaraan politik melalui organisasi modern yang disebut kemudian sebagai ‘partai’ adalah salah satu pembeda dalam meraih kekuasaan politik pasca peristiwa NATICO I, setelah CSI berganti namanya menjadi sebuah partai politik, Partai Sarekat Islam (PSI, 1920) yang kemudian diikuti oleh kelompok lainnya seperti kaum sosialis-komunis, yang membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI, 1921) dan kaum nasionalis-sekuler membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI, 1926).

Titik Nol kesadaran untuk berpemerintahan sendiri berlandaskan Islam, sebagaimana disuarakan oleh Central Sarekat Islam (CSI) pada NATICO I (1916, Juni) bahkan ternyata merupakan kelanjutan dari sebuah embrional di Laweyan 600 tahun

yang lalu, di wilayah tempat lahirnya Sarekat Dagang Islam 16 Oktober 1905 sebagai cikal bakal CSI.

Tempat bersejarah pada 17-24 Juni 1916 adalah di Kota Bandung, tepatnya Alun-alun depan Masjid Agung (hari ini disebut Mesjid Raya Jawa Barat) dan Gedung Concordia, *icon* kemewahan elitis dan prestisius para ningrat dan pejabat Kolonial Belanda yang terkenal ke seantero Eropa pada waktu itu. Disayangkan jejak sejarah ini hilang (dihapuskan) dari ingatan kolektif bangsa pribumi muslim (Nusantara) yang kemudian berubah namanya menjadi Indonesia (sejak 1928).

Alun-alun berubah fungsi menjadi tempat rekreasi dan Gedung Concordia (Gedung Merdeka, 1955) tidak memiliki sambungan sejarah dengan peristiwa NATICO I dengan *Zelfbestuur*-nya HOS Tjokroaminoto dan Central Sarekat Islam. Inilah ironi, bagi bangsa pribumi Muslim sebagai pemilik sah Nusantara ini berabad-abad lamanya sejak kesultanan-kesultanan dan kerajaan (Islam)'

Kita harus mencari Titik Nol baru yang disepakai oleh pribumi bangsa muslim di Indonesia saat ini, sehingga sejarah masa depan *Zelbestuur*, 100 tahun yang lalu bukan saja menjadi ingatan kolektif tetapi juga menjadi semangat gerakan bersama untuk mewujudkannya di Melinium ini.

Dari sudut kajian ilmiah sejarah, tentulah peristiwa NATICO I perlu mendapatkan perhatian dengan berbagai seminar nasional sejarah, yang lebih kaya dengan dokumen dan data-data. Bahkan, dengan perspektif ilmu pemerintahan, sejarah pemerintahan pun akan mengalami rekonstruksi. Banyak pakar pemerintahan dan tata negara kita tidak mengetahui sejarah NATICO I sebagai Titik Nol kesadaran berpemerintahan sendiri. Inilah salah satu tugas seminar sejarah nasional ke depan untuk lebih membuka diri terhadap kebenaran sejarahnya yang lama ditutup-tutupi atau dipinggirkan karena alasan kekuasaan. Kondisi politik nasional saat ini merupakan saksi hidup, betapa keharusan untuk kembali membaca Titik Nol sejarah keindonesian menjadi agenda nasional kita ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah, (1978) "Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang" Jakarta: Yayasan Idayu
- An Nuur Sakha (2011) Saudagar Laweyan Abad XX: Peran dan Eksistensi dalam Membangun Perekonomian Muslim. Skripsi. FKIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Elson..R.E. (2009). The Idea of Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Gagasan.Serambi.Jakarta.
- Fauziah Kurniati (2015) Pengaruh Modal Sosial Terhadap Eksistensi Pola Hubungan Antara Juragan Dan Kaum Pekerja Kampoeng Batik Laweyan, Laporan Studi Pustaka (KPM 403), Departemen SKMPM, Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor
- Gani, M. Abdul (1984). Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam. Jakarta: Bulan Bintang
- Hamijaya, N. A. (2019). Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri Zelfbestuur: Dari Bangsa Pribumi Muslim di Hindia Timur. Pusbangter.
- Indonesia, P. P. S. D. R. (2017). Sejarah Konperensi Asia-Afrika. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Korver, A.P.E. (1985). Serikat Islam, Gerakan Ratu Adil. Jakarta: Grafiti Press.
- Priyatmono, Alpha Febela (2004) Studi Kecenderungan Perubahan Morfologi Kawasan di Kampung Laweyan Surakarta, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Shodiq, F. Kyai Ageng Henis Dalam Sejarah Industri Batik Laweyan Surakarta, Jurnal GEMA Tahun XXX/52; 2017
- Setyarso, B. (2017). Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa. Penerbit KP.
- Soedarmono (1987) "Munculnya Kelompok Pengusaha Batik Di Laweyan Pada Awal Abad XX", (Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Suharto, A. (2021). Sarekat Islam Surakarta 1912-1923. Penerbit KC.
- Suryanegara, A. M. (1998). Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Mizan.
- Suryanegara, A. M. (2011a). Api Sejarah 1. Salamadani.
- Suryanegara, A. M. (2011b). Api Sejarah 2. Salamadani.